

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN (RLPPD) TAHUN 2024



H. Rahmas Mas'ud, S.E., M.E.
Wali Kota Balikpapan

Dr. Ir. H. Bagus Susetyo M.M.
Wakil Wali Kota Balikpapan

I. CAPAIAN INDEKS MAKRO KOTA BALIKPAPAN



III. HASIL EVALUASI EPPD DAN OPINI LAPORAN KEUANGAN

HASIL EPPD TAHUN SEBELUMNYA

Skor EPPD tahun 2022 dengan skor 3.1566 predikat status kinerja sedang. Hasil EPPD tahun 2023 belum rilis.

OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA

Opini atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Surat BPK RI Nomor: 16.A/LHP/XIX.SMD/IV/2024 Tanggal 30 April

II. CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR



IV. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

URAIAN	PENERIMAAN SETELAH PERUBAHAN		
	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan Daerah	4.009.361.741.261,00	4.020.535.025.062,62	100,28
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.196.859.325.739,00	1.066.692.925.336,93	89,12
Pendapatan Transfer	2.751.412.260.000,00	2.887.703.799.448,00	104,95
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	61.090.155.522,00	66.138.300.277,69	108,26

URAIAN	PENGELUARAN SETELAH PERUBAHAN		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Operasi	2.882.993.404.971,99	2.487.779.432.633,22	86,29
Belanja Modal	1.649.753.118.314,00	1.442.250.144.883,62	87,42
Belanja Tidak Terduga	13.237.686.429,37	12.135.375.577,00	91,67
Belanja Transfer	0	0	-
Total Belanja Daerah	4.545.984.209.715,36	3.942.164.953.093,84	86,72

V. INOVASI DAERAH

- ONE MAP ONE DATA
- Portal Belajar ASN (DINDA)
- Pusat hasil Kajian, Penelitian & Jurnal Daerah (PUSAKA JUARA)
- SPIRIT KPBU
- Pengukuran Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi (REAKSI)
- SI - YANKES (Sistem Informasi Layanan Kesehatan)
- MENGGURITA "Menggerakkan Guru Menyelesaikan Aksi Nyata"
- PIONIR (Pelayanan Informasi Obat Informatif dan Rasional)
- PANTAI MAS PERMAI KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
- BEKAPAI FOOD SPACE KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
- BAPAK/BUNDA ASUH ANAK STUNTING KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA (BASTING)
- GEMPITA MOBILE BERKAT ASRI MANTAP (Pemberdayaan Masyarakat dalam Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresure)
- SIMPANANKU KOPI (SISTEM PELAYANAN KHUSUS KOMPREHENSIF)
- SISTEM PENDAFTARAN ONLINE TANPA ANTRIAN (SPONTAN)
- LIHAT JAKETKU KEREN
- Panah Asmara (Pelayanan Mudah Agar Masyarakat Bahagia)
- FROM IDEA TO START UP "FITS BALIKPAPAN"
- KeCe BerAT
- SI PERMATA adalah Sinergi Pemberdayaan Masyarakat Kreatif Dalam Pengembangan Pariwisata Balikpapan
- SIPOLDA CERDAS (Sistem Pelayanan Surat Pindah Sekolah Dasar, Ciptakan Efektivitas Kerja dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat)
- Bank sampah Emas
- Meningkatkan Kemampuan Menghitung Konsep Dasar Pembagian Melalui Media Mistar Pembagian

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Allah SWT, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Kota Balikpapan tahun 2024 telah selesai disusun dan disampaikan kepada masyarakat Kota Balikpapan tepat waktu. Penyusunan RLPPD sebagai upaya dalam melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana dalam ketentuan tersebut bahwa Wali Kota selaku penyelenggara Pemerintah Daerah Kota wajib secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) kepada masyarakat sebagai bahan informasi atas pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan Kota Balikpapan di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Kota Balikpapan yang nyaman dihuni, dan semoga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Balikpapan Tahun 2024 ini memberi manfaat serta dapat dijadikan landasan sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan yang strategis untuk kepentingan rakyat dan demi kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan pemerintah daerah secara mandiri memberikan peningkatan pelayanan, peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Bentuk implementasi fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Balikpapan telah merumuskan berbagai kebijakan strategis dalam melaksanakan pembangunan daerah. Indikator utama dalam penyusunan kebijakan yang ada, diarahkan pada upaya untuk optimalisasi dan pemanfaatan berbagai sumber daya (resources) yang dimiliki Kota Balikpapan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, kemampuan dan kebutuhan daerah. Selain itu juga dengan memperhatikan kekhasan dan potensi unggulan yang ada. Capaian Kinerja Makro Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kota Balikpapan

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	TAHUN 2023	TAHUN 2024	PERUBAHAN%
1	Indeks Pembangunan Manusia	82.03	82.62	0.719%
2	Angka Kemiskinan	2.31	2.23	-3.463%
3	Angka Pengangguran	6.09	6.22	2.135%
4	Pertumbuhan Ekonomi	6.49	3.23	-50.231%
5	Pendapatan Perkapita	201.64	214.11	6.184%
6	Ketimpangan Pendapatan	0.323	0.324	0.31%

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN LAYANAN DASAR

Pelayanan dasar yang dimaksud dalam ringkasan capaian kinerja tersebut adalah pelayanan dasar pada urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga urusan sosial. Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pada masing-masing urusan pelayanan dasar dimaksud:

1. Urusan Pendidikan

a. Capaian Kinerja Outcome

Tabel 1.2
Capaian Kinerja Outcome Urusan Pendidikan

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini	99.92%	97.28%
2	Pendidikan Dasar	91.83%	93.32%
3	Pendidikan Kesenjangan	83.66%	97.65%

b. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja urusan Pendidikan Kota Balikpapan tahun 2024 sebesar Rp.446.452.824.165 dengan Program/Kegiatan Sebagai berikut:

Tabel 1.3
Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
KOTA BALIKPAPAN			481,350,995,753	446,452,824,165	92.75 %
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			481,350,995,753	446,452,824,165	92.75 %
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			183,961,523,710	178,650,397,387	97.11 %
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			219,367,260,743	196,517,975,016	89.58 %
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			44,692,949,500	39,707,237,835	88.84 %
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			33,329,261,800	31,577,213,927	94.74 %

c. Permasalahan yang di hadapi

- Data anak usia sekolah yang tidak bersekolah tidak terdata di Sekolah Formal maupun NonFormal;
- Melibatkan banyak instansi terkait (lintas sektor) seperti DRKA, Kanwil KEMENAG dan Badan Dayah; - Data yang tersedia bersifat anomali;
- Nomenklatur sub kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan permendikbud ttg SPM;
- Mindset Bidang, kepeka dan guru terhadap inklusivitas terbatas pada anak2 inklusif saja;
- Faktor kekurangan guru dan tendik juga membuat kinerja tak maksimalFaktor tak adanya kepeka definitif membuat kondusivitas sekolah tak menjamin iklim keamanan dan ;
- Sarpras yang tak lengkap juga membuat keamanan dan inklusivitas kurang baik;

2. Urusan Kesehatan

a. Capaian Kinerja Outcome

Tabel 1.4
Capaian Kinerja Outcome Urusan Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96.52%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	99.14%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	89.99%	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	97.21%	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	90.10%	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	96.54%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	98.45%	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	93.07%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	98.32%	100%

b. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja urusan Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2024 sebesar Rp.8.122.468.399 dengan Program/Kegiatan Sebagai berikut:

Tabel 1.5
Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
KOTA BALIKPAPAN			8,883,536,726	8,122,468,399	91.43 %
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			8,883,536,726	8,122,468,399	91.43 %
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			8,883,536,726	8,122,468,399	91.43 %
1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1,024,594,000	901,973,924	88.03 %

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	719,942,000	600,588,260	83.42 %
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	564,111,210	476,344,890	84.44 %
4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	400,000,000	383,630,000	95.91 %
5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	760,500,000	707,111,750	92.98 %
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	625,000,000	563,090,730	90.09 %
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	400,000,000	354,322,100	88.58 %
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	250,000,000	218,241,700	87.30 %
9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	1,535,062,816	1,444,184,195	94.08 %
10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	250,000,000	239,759,750	95.90 %
11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	1,836,976,700	1,757,723,050	95.69 %
12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	517,350,000	475,498,050	91.91

c. Permasalahan yang dihadapi Urusan Kesehatan

SPM bidang Kesehatan terdiri dari 12 indikator, seluruh indikator telah tercapai 100% target yang ditentukan. Tingginya angka capaian ini tak lepas dari berbagai upaya dan strategi yang disusun untuk mencapai target setinggi-tingginya dan mengatasi kendala yang dihadapi.

- Beberapa Puskesmas masih beradaptasi dengan juknis SPM terbaru;
- Masih terdapat kendala pada aplikasi penginputan (saat ini masih terdapat 2 aplikasi input data yaitu SIPTM dan ASIK);
- SDM / tenaga penginputan kurang, penanggungjawab program juga sebagai petugas skrining, petugas pelayanan di Poli/BP, memegang program kegiatan, dll;
- Kendala dalam proses input data di aplikasi SIHA, tidak ada petugas khusus input data difaskes; dan
- Laporan aplikasi SIHA yang kadang masih kurang dipahami oleh sebagian petugas jika terjadi kesalahan/kekeliruan dalam input data.
- Keterbatasan pengiriman jumlah Logistik BMHP IMS; dan
- Proses penyesuaian logistik reagen baru dengan yang ber TKDN.
- Produk import perlu waktu untuk persetujuan pengadaan non TKDN hingga tingkat kota;
- Pengadaan pot dahak dan Cartridge TCM datang di TW 4.
- Tidak semua ibu hamil periksa ke puskesmas dan faskes mitra puskesmas belum semua melaporkan hasil pelayanan ANC ke puskesmas;

- Pencatatan dan pelaporan belum dilaksanakan secara terintegrasi meskipun telah tersedia tools pencatatan dan pelaporannya, misal e-kohort;
 - Jumlah Baduta yang melakukan imunisasi lanjutan mengalami penurunan karena orangtua sudah enggan membawa anak imunisasi setelah anak berusia 9 bulan;
 - belum semua fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan skrining SPM;
 - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pro-aktif melakukan cek kesehatan;
 - Kurangnya kesadaran penderita Diabetes Mellitus untuk mengonsumsi obat dan kontrol secara teratur;
 - Dukungan investigasi kontak belum maksimal dalam meningkatkan skrining terduga TBC difaskes;
- Penjangkauan populasi kunci untuk kelompok non LSL semakin menurun

3. Urusan Pekerjaan Umum

a. Capaian Kinerja Outcome

Tabel 1.6
Capaian Kinerja Outcome Urusan Pekerjaan Umum

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	98.96%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	94.28%	100%

b. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja urusan Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2024 sebesar Rp.13.150.127.428 dengan Program /Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.7
Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
KOTA BALIKPAPAN			14,980,691,100	13,150,127,428	87.78 %
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		8,457,689,000	7,912,210,271	93.55 %
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota		6,523,002,100	5,237,917,157	80.30 %

c. Permasalahn yang dihadapi urusan Pekerjaan Umum

- Penambahan Jumlah penduduk di Kota Balikpapan akibat Pembangunan Kilat dan Pembangunan IKN sangat masip dan menjadi permasalahan klasik Kota Besar dalam Pengumpulan Data Jumlah Penduduk berdasarkan Rumah Tangga;
- Data yang tersedia dari Disdukcapil Kota Balikpapan adalah Data Kartu Keluarga.
- Menghitung Jumlah Rumah Tangga dengan dasar Jumlah Kartu Keluarga dari DISDUKCAPIL Kota Balikpapan tidak dapat menggambarkan kondisi Rumah Tangga yang sesungguhnya, karena masih ada 1 Rumah Tangga dihuni lebih dari 1 Kartu Keluarga, bahkan ada yang dalam 1 Rumah Tangga memilki 4 sampai 5 Kartu Kelurga;
- Pelanggan Air Minum yang tidak dapat diakses oleh PTMB (PDAM) untuk Data BNBA, karena ada saja Pelanggan yang memilki 2/lebih Rumah, sebagai contoh Pak Andi memilki Rumah di Kecamatan A Kelurahan A.2 dan di Kecamatan C Kelurahan C.1, sehingga data yang terdaftar di PTMB adalah Pak Andi memililki

SR 2 di Kecamatan A Kelurahan A.2 (Rumah yang terdaftar di PTMB), sehingga Data BNBA Rumah Pak Andi di Kecamatan C Kelurahan C.1 tidak terdaftar.

- Penganggaran perlu adanya dukungan dari APBN dan sumber-sumber Pendanaan Lainnya.
- Keterbatasan Air Baku sehingga tidak tersedia Idle Capacity di Kota Balikpapan yang diakibatkan Kemarau Panjang, sehingga debit Air di Waduk Manggar dan Waduk Teritip sebagai Sumber Utama Air Bersih juga ikut turun, selain itu Ijin pengambilan Air Baku juga harus sesuai dengan ijin dari BWS

4. Urusan Perumahan Rakyat

a. Capaian Kinerja Outcome

Tabel 1.8
Capaian Kinerja Outcome Urusan Perumahan Rakyat

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%	100%

Pelaksanaan Urusan SPM Perumahan Rakyat Kota Balikpapan Tahun 2024:

- a. Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-360/2024 Tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Selatan, dan Kecamatan Balikpapan Utara, serta pergerakan tanah/longsor di Rukun Tetangga 26 kelurahan Gunung Sari Ulu, Rukun Tetangga 02 Kelurahan Mekar Sari, Rukun Tetangga 14 Kelurahan Sumber Rejo, Rukun Tetangga 02 dan Rukun Tetangga 13 Kelurahan Karang Rejo, Rukun Tetangga 02 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Rukun Tetangga 01 dan Rukun Tetangga 06 Kelurahan Telaga Sari, Rukun Tetangga 09 dan Rukun Tetangga 14 Kelurahan Prapatan, Rukun Tetangga 39 Kelurahan Sepinggian, Rukun Tetangga 31 Kelurahan Muara Rapak, Rukun Tetangga 03 Kelurahan Gunung Samarinda, dan Rukun Tetangga 44 Kelurahan Graha Indah.
- b. Pelaksanaan Kegiatan Updating Verifikasi data penerimaan rumah korban bencana alam Tahun 2024 oleh perangkat daerah Pengampu SPM Perumahan.
- c. Hingga Akhir pelaksanaan Tahun Anggaran, dari hasil tahapan proses pelaksanaan SPM perumahan Tahun 2024 belum diterbitkan SK Penetapan Penerima bantuan, dan pelaksanaan baru akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2025
- d. Untuk pelaksanaan SPM Perumahan dikarenakan Program Pemerintah, Pemerintah Kota Balikpapan belum melaksanakan lebih lanjut dikarenakan belum adanya Program yang berpotensi untuk dilaksanakannya Relokasi. Sesuai dengan Aplikasi SPM terkait dengan jenis pelayanan dasar urusan perumahan rakyat tidak terdapat kejadian bencana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Penetapan Bencana oleh Walikota/Gubernur, sehingga untuk tahun 2024 capaian SPM nya menjadi 100% pada jenis layanan penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota.

b. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Permukiman

Realisasi belanja urusan Perumahan Rakyat Kota Balikpapan Tahun 2024 sebesar Rp.488.172.776 dengan Program /Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.9
Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Permukiman

NO	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
KOTA BALIKPAPAN			1,813,820,000	488,172,776	26.91 %
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			1,578,820,000	388,161,297	24.59 %
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			225,000,000	197,175,476	87.63 %
1	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	75,000,000	60,906,930	81.21 %
2	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	100,000,000	88,418,236	88.42 %
3	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	50,000,000	47,850,310	95.70 %
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1,353,820,000	190,985,821	14.11 %
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	1,000,000,000	63,192,311	6.32 %
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	100,000,000	21,447,600	21.45 %
3	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	253,820,000	106,345,910	41.90 %

c. Permasalahn yang dihadapi Urusan Perumahan dan Permukiman

- Belum sinkronisasi data kawasan rawan bencana antar disperkim dan BPBD;
- Belum ada lanjutan terkait hasil pendataan lahan-lahan potensial untuk relokasi korban bencana dan program pemerintah kota;
- Belum terdapat perwali yang mengatur tentang besaran nilai untuk bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah dengan klasifikasi kerusakan ringan, sedang, dan berat;
- Terdapat anggaran sisa dikarenakan belum ada penanganan untuk penerima bantuan;
- Belum ada acuan besaran nilai untuk bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah dengan klasifikasi kerusakan ringan, sedang, dan berat;
- Kurangnya koordinasi antar opd pengampu kegiatan SPM;
- Hingga akhir pelaksanaan tahun anggaran, dari hasil tahapan proses pelaksanaan spm perumahan tahun 2024 belum diterbitkan sk penetapan penerima bantuan, dan pelaksanaan baru akan dilakukan pada tahun anggaran 2025;
- Dikarenakan program pemerintah, pemerintah kota Balikpapan belum melaksanakan lebih lanjut dikarenakan belum adanya program yang berpotensi untuk dilaksanakannya relokasi;
- Belum dilaksanakan penanganan pemberian bantuan rehabilitasi rumah kepada korban bencana dikarenakan belum terdapat sk penetapan penerima bantuan; dan

- Belum dilaksanakan relokasi rumah di lokasi rawan bencana.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Capaian Kinerja Outcome

Tabel 1.10
Capaian Kinerja Outcome Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)	94.14%	100%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	100%	100%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	98.77%	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	100%	100%

b. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi belanja urusan Trantibumlinmas Kota Balikpapan Tahun 2024 sebesar Rp.20.740.465.112 dengan Program /Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.11
Realisasi Belanja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
KOTA BALIKPAPAN			21,807,170,900	20,740,465,112	95.11 %
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)			10,067,170,900	9,584,086,682	95.20 %
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		8,929,552,800	8,471,863,558	94.87 %
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455		1,112,040,500	1,086,757,224	97.73 %
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457		25,577,600	25,465,900	99.56 %
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)			1,915,000,000	1,872,751,138	97.79 %
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456		100,000,000	95,422,220	95.42 %
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443		650,000,000	629,543,200	96.85 %

No	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445		300,000,000	296,914,900	98.97 %
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446		865,000,000	850,870,818	98.37 %
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)			9,825,000,000	9,283,627,292	94.49 %
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449		6,966,130,000	6,541,860,622	93.91 %
2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450		450,000,000	443,261,500	98.50 %
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459		1,400,000,000	1,296,482,130	92.61 %
4	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458		1,008,870,000	1,002,023,040	99.32 %

c. Permasalahan yang dihadapi Urusan Trantibumlinmas

1. Satpol-PP

- Personel Satpol PP belum terlatih dalam pengumpulan dan pengelolaan data. Anggaran hanya berbasis data kejadian sebelumnya;
- Kesulitan dalam memastikan identitas warga yang terkena dampak;
- Pencatatan manual rentan terhadap kesalahan;
- Kurangnya Data Akurat warga terdampak dan kerugian materil sering tidak lengkap atau tidak terverifikasi;
- Tidak ada pedoman teknis yang jelas dalam menghitung kebutuhan untuk pemenuhan pelayanan dasar;
- Hasil perhitungan kebutuhan tidak selalu masuk dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD atau APBD;
- Kesulitan dalam Menghitung Dampak Ekonomi dari Kerugian Materil karena Tidak ada mekanisme yang sistematis untuk menghitung dampak ekonomi akibat gangguan Trantibum;
- Keterbatasan Anggaran dalam Pelaksanaan di Lapangan, Sering kali anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk operasional penegakan Trantibum;

2. Bencana dan Kebakaran

- Masih kurang minatnya warga untuk datang ke tempat pelatihan dan simulasi kebencanaan;
- Kegiatan dan pencegahan dan kesiapsiagaan yang non anggaran tidak ikut dilaporkan padahal ini mampu mendongkrak jumlah kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Keberhasilan kegiatan ini sangat ditentukan kapasitas dan kualitas personil lapangan;
- Respon time dalam penanganan kebakaran harus selalu ditingkatkan

6. Urusan Sosial

a. Capaian Kinerja Outcome

Tabel 1.12
Capaian Kinerja Outcome Urusan Sosial

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	99.46%	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100%	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	99.08%	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	99.64%	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	22.07%	91.68%

b. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja urusan Trantibumlinmas Kota Balikpapan Tahun 2024 sebesar Rp.2.072.957.229 dengan Program /Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.13

Realisasi Belanja Urusan Sosial

No	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
KOTA BALIKPAPAN			2,545,852,590	2,072,957,229	81.42 %
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			2,545,852,590	2,072,957,229	81.42 %
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			2,103,737,266	1,667,771,229	79.28 %
1	Penyediaan permakanan	Orang	1,578,495,900	1,177,580,600	74.60 %
2	Penyediaan sandang	Orang	54,998,566	50,844,400	92.45 %
3	Penyediaan alat bantu	Orang	350,242,800	337,167,171	96.27 %
4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	20,000,000	12,485,500	62.43 %
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	80,000,000	73,077,858	91.35 %
6	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	20,000,000	16,615,700	83.08 %
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			442,115,324	405,186,000	91.65 %
1	Penyediaan makanan	Orang	187,425,000	155,790,000	83.12 %
2	Penyediaan sandang	Orang	149,691,000	147,691,000	98.66 %
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	54,999,700	53,345,000	96.99 %
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	24,999,624	23,800,000	95.20 %
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	25,000,000	24,560,000	98.24 %

c. Permasalahan yang dihadapi

- Belum tersedianya aplikasi pengolah data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

- Data bersifat insidental/perkiraan dari trend tahun-tahun sebelumnya sehingga kesulitan untuk menyusun rencana kebutuhan;
- Beberapa standar teknis yang diatur dalam Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan kebutuhan;
- Penyusunan rencana kebutuhan terbatas pada alokasi anggaran dan penyediaan sub kegiatan (beberapa sub kegiatan terkait SPM tidak dialokasikan dalam DPA karena belum ada tertuang dalam renja), sehingga alokasi anggaran tidak sesuai dengan nomenklatur (misalnya alokasi penyediaan perbekalan kesehatan dialokasikan ke sub kegiatan alokasi penyediaan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, idealnya dialokasikan khusus di sub kegiatan penyediaan perbekalan kesehatan);
- Kewenangan Kabupaten/Kota hanya mendirikan rumah singgah yang memiliki standar pelayanan maksimal selama 7 (tujuh) hari sedangkan dalam pelaksanaannya ada beberapa PPKS tinggal bertahun-tahun di Rumah Singgah karena PPKS tidak dapat direunifikasi ke keluarga/dirujuk ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial; dan
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan SPM masih belum maksimal, seperti petugas rumah singgah, pekerja sosial, psikolog.

3. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya.

Hasil EPPD Tahun 2023 belum di peroleh namun Hasil EPPD seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk tahun 2022 yang di dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-664 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota Tahun 2022, Kota Balikpapan memperoleh skor **3,1566** dan mendapatkan predikat status kinerja **sedang**.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023 bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian, ini merupakan opini WTP yang ke 10 (sepuluh) kali berturut-turut mulai tahun anggaran 2014 hingga tahun anggaran 2023.

4. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan (unaudited) tahun 2024, Realisasi Pendapatan Kota Balikpapan Tahun 2024 mencapai Rp.4.020.535.025.062,62 dan Realisasi Belanja Daerah Kota Balikpapan tahun 2024 mencapai Rp. 3.942.164.953.093,84

Secara rinci, rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.14
Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2024
(Sebelum dilakukan audit BPK-R)

KODE	URAIAN	JUMLAH (RP)		capaian
		TARGET	REALISASI	%
PENDAPAPATAN				
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.196.859.325.739,00	1.066.692.925.336,93	100.28%
2	PENDAPATAN TRANSFER	2.751412.260.000.00	2.887.703.799.448,00	89.12%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	61.090.155.522.00	66.138.300.277,69	104.95%
JUMLAH PENDAPATAN		3.732.305.262.770,00	4.020.535.062,62	08.26%

Tabel 1.15
Relisasi Penerimaan Menurut Jenis Penerimaan Tahun Anggaran 2024
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

KODE	URAIAN	JUMLAH (RP)		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	%
BELANJA DAERAH				
1	BELANJA OPERASI	2.882.993.404.971,99	2.487.779.432.633,22	86,29
05.01.01	Belanja Pegawai	1.126.715.873.894,99	948.731.492.872,02	84,2
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.575.121.072.745,00	1.371.045.528.426,11	87,04
05.01.04	Belanja Subsidi	210.000.000,00	0	0
05.01.05	Belanja Hibah	174.575.058.332,00	163.812.269.486,59	93,83
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	6.371.400.000,00	4.190.141.848,50	65,76
2	BELANJA MODAL	1.649.753.118.314,00	1.442.250.144.883,62	87,42
05.02.01	Belanja Modal Tanah	35.521.764.560,00	28.443.334.370,00	80,07
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	255.216.333.647,00	243.860.563.977,23	95,55
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	468.423.701.591,00	318.046.523.523,33	67,9
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	872.559.455.616,00	836.422.774.617,61	95,86
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.454.759.900,00	1.412.242.944,00	97,08
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	16.577.103.000,00	14.064.705.451,45	84,84
3	BELANJA TAK TERDUGA	13.237.686.429,37	12.135.375.577,00	91,67

KODE	URAIAN	JUMLAH (RP)		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	%
05.03	Belanja Tak Terduga	Rp13.237.686.429,37	Rp12.135.375.577,00.	58.08%
05.04	BELANJA TRANSFER	-	-	0%
BELANJA DAERAH		4.545.984.209.715,36	3.942.164.953.093,84	86,72

5. INOVASI DAERAH

Inovasi Daerah merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.16
Inovasi Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2024

NO	NAMA INOVASI	JENIS	KETERANGAN
1	One Map One Data	Digital	Manfaat One Map One Data Bagi Pemerintah Kota Balikpapan : 1. Sistem Informasi tersebut sebagai alat penyampaian informasi tata ruang secara elektronik dan alat untuk mengukur kualitas penataan ruang di Kota Balikpapan, 2. Sistem informasi tersebut sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. 3. Sistem informasi tersebut sebagai dasar pemberian rekomendasi Ijin Tapak (Site Plan) perumahan dan penataan permukiman di Kota Balikpapan, 4. Sistem Informasi tersebut sebagai dasar penyusunan peta pengembangan potensi investasi dan rencana umum penanaman modal di Kota Balikpapan 5. Peta RTR terintegrasi dalam sistem OSS-RBA mempermudah penerbitan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Balikpapan 6. Sistem Informasi tersebut sebagai dasar penyusunan KLHS (Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis), perencanaan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Privat yakni 30 % (tiga puluh prosen) dari keseluruhan wilayah Kota Balikpapan dan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap dugaan pengerusakan dan pencemaran lingkungan di Kota Balikpapan, 7. Sistem Informasi tersebut sebagai dasar perencanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan wewenang tugas pokok dan fungsinya; 8. Sistem Informasi tersebut sebagai dasar perencanaan manajemen transportasi dan rekayasa lalu lintas di Kota Balikpapan 9. Sistem Informasi tersebut sebagai dasar penyusunan mitigasi bencana di Kota Balikpapan

NO	NAMA INOVASI	JENIS	KETERANGAN
			10. Daerah dan Retribusi Daerah Sistem Informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan NJOP di Kota Balikpapan 11. Sistem Informasi tersebut sebagai alat bantu percepatan pensertipikatan aset tanah milik Pemerintah Kota Balikpapan. Manfaat Bagi Masyarakat dan Stakeholders : 1. Kantor Pertanahan Kota Balikpapan : Sistem Informasi tersebut sebagai dasar pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka pemberian hak atas tanah dan pelaksana tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia : Peta digital RTR Balikpapan terintegrasi dengan Aplikasi GISTARU yang dibangun oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang mempermudah perencanaan pembangunan nasional di Kota Balikpapan. 3. Badan Informasi Geospasial : Mendukung percepatan program Kebijakan Satu Peta yang dibangun Badan Informasi Geospasial. 4. Masyarakat Kota Balikpapan : Dapat mengetahui Informasi Tata Ruang dan ketentuan tata bangunan dan lingkungan secara cepat dan akurat terutama bagi masyarakat yang akan merencanakan sebuah kegiatan, baik dalam rangka kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan investasi
2	Portal Belajar ASN (DINDA)	Digital	Manfaat Internal : 1. Mendukung peningkatan nilai capaian target kinerja BKPSDM Kota Balikpapan, dan peningkatan nilai indeks profesionalitas ASN. 2. Mendukung keberhasilan penerapan sistem merit di lingkup Kota Balikpapan. 3. Efisiensi Anggaran Pelatihan, sasaran partisipan besar Manfaat Eksternal : 1. Tersedianya media pembelajaran dengan desain baru dalam rangka pemenuhan pengembangan kompetensi minimal ASN 2. Peningkatan kualitas kompetensi ASN Kota Balikpapan yang sejalan dengan target kinerja dan visi organisasi 3. Peningkatan Layanan kepegawaian khususnya di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan, melalui kemudahan layanan yang diberikan.
3	Pusat hasil Kajian, Penelitian & Jurnal Daerah (PUSAKA JUARA)	Digital	Terlaksananya Forum Kelitbangan sebagai bentuk kolaborasi dari berbagai unsur knowledge produser, dimana akan menjadi bagian pada tahapan penyusunan perencanaan sebelum dilaksanakannya forum perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tema tahunan pada RKPD.

NO	NAMA INOVASI	JENIS	KETERANGAN
4	Strategi Pengembangan Infrastruktur dan Investasi Melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (SPIRIT KPBU)	Digital	Manfaat Internal : - Tersedianya daftar infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha, - Tersusunnya profil infrastruktur yang berpotensi dikerjasamakan dengan badan usaha, - Meningkatnya pengetahuan sumber pembiayaan alternatif, Meningkatnya nilai capaian IKU Bappeda Litbang Kota Balikpapan, - Tersedianya opsi pembiayaan infrastruktur, - Meningkatnya peluang investasi di Kota Balikpapan, - Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Manfaat Eksternal : - Tersedianya panduan pelaksanaan KPBU tingkat daerah yang dapat diadopsi daerah lain, - Memberikan akses peluang kerjasama dalam hal penyediaan infrastruktur publik, - Mendorong partisipasi dalam penyediaan infrastruktur, - Mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim dan Regional.
5	Pengukuran Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi (REAKSI)	Digital	Manfaat Jangka Pendek : - Manfaat Internal : Tersedianya platform sebagai sarana penyimpanan dokumen pelaporan hasil pengukuran akuntabilitas kinerja dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan; Optimalisasi pemanfaatan hasil pengukuran akuntabilitas dan evaluasi dalam rangka penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan; -Memudahkan proses atau mekanisme pelaporan akuntabilitas dan evaluasi dalam satu platform yang terintegrasi. - Manfaat Eksternal : Memberikan informasi terkait data-data capaian pembangunan Kota Balikpapan yang lebih terukur dan mudah dipahami. Manfaat Jangka Menengah : - Manfaat Internal : Tersediaanya dukungan penganggaran aksi perubahan, Tersedianya platform pelaporan kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan secara terpadu. - Manfaat Eksternal : Terintegrasinya dokumen pelaporan Pemerintah Kota Balikpapan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akuntabel terkait kinerja pemerintahan dan pembangunan.

NO	NAMA INOVASI	JENIS	KETERANGAN
6	Sistem Informasi Layanan Kesehatan (SI - YANKES)	Digital	Mendukung arah kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2026. Adanya produk informasi layanan kesehatan di Kota Balikpapan. 3. Meningkatkan akurasi dan kualitas data layanan kesehatan di Kota Balikpapan. 4. Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan informasi kesehatan. 5. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara fasilitas pelayanan kesehatan. 6. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi bidang kesehatan. 7. Mendorong adopsi teknologi informasi kesehatan. 8. Database informasi layanan kesehatan yang akurat.
7	Menggerakan Guru Menyelesaikan Aksi Nyata (MENGGURITA)	Non-digital	Adapun Manfaat dari Menggurita ini adalah untuk: 1. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam memahami setiap topik di IKM. 2. Membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan 3. Memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas untuk belajar secara berkelanjutan. 4. Menumbuhkan kepercayaan diri bagi anggota untuk berpartisipasi aktif di dalam komunitas. 5. Menerapkan hasil belajar yang diperoleh dari komunitas pada pekerjaan sehari-hari. 6. Merefleksikan hasil pelaksanaan pembelajaran untuk mendapatkan umpan balik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih efektif.
8	Pelayanan Informasi Obat Informatif dan Rasional (PIONIR)	Teknologi	Manfaat internal adalah meningkatkan jumlah pasien dan masyarakat yang terpapar Pelayanan Informasi Obat, meningkatkan nilai capaian indikator mutu UPTD Puskesmas Baru Ilir, meningkatkan cakupan SPM (Standar Pelayanan Minimal) UPTD Puskesmas Baru Ilir, meningkatkan jumlah pasien Hipertensi dan Diabetes Mellitus yang terkontrol. Manfaat eksternal adalah meningkatkan fungsi jejaring apotek dalam pemberian Pelayanan Informasi Obat terstandar oleh sejawat Apoteker, dapat menjangkau lebih luas dengan pelayanan telefarmasi online, meningkatkan kepatuhan minum obat pasien hipertensi dan diabetes mellitus dan meningkatkan jumlah terkontrolnya penyakit tersebut.
9	Pantai Mas Permai Kecamatan Balikpapan Kota	Non-digital	Program Pantai Mas Permai merupakan program Kecamatan Balikpapan Kota untuk melakukan percepatan penerapan dan pengembangan Ekonomi Kreatif serta penertiban lingkungan. Seluruh perangkat di Kecamatan Balikpapan Kota dan pemangku kepentingan diminta berperan aktif dalam mendukung Pantai Mas Permai menjadi Kawasan Wisata Pantai dan Kuliner Kota Balikpapan yang nyaman, melalui kegiatan : 1. Menetapkan Pantai di sekitar kantor Kecamatan Balikpapan Kota sebagai Kawasan Wisata Pantai Mas Permai di Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota

NO	NAMA INOVASI	JENIS	KETERANGAN
			2. menetapkan Pantai di sekitar kantor Kecamatan Balikpapan Kota sebagai Kawasan Wisata Kuliner Pantai Mas Permai di Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota.
10	Bekapai Food Space kecamatan Balikpapan Kota	Non-digital	Program Bekapai Food Space merupakan program Kecamatan Balikpapan Kota untuk melakukan percepatan penerapan dan pengembangan Ekonomi Kreatif. Seluruh perangkat di Kecamatan Balikpapan Kota dan pemangku kepentingan diminta berperan aktif dalam mendukung Bekapai Food Space menjadi Kawasan Wisata Kuliner Kota Balikpapan yang nyaman, melalui kegiatan : 1. Menetapkan Pesona Bekapai (Pedagang Asongan Binaan Taman Bekapai) sebagai Pedagang Asongan di Taman Bekapai 2. Menetapkan Bang Japai (Abang Juru Parkir Bekapai) sebagai Juru Parkir Binaan di Taman Bekapai. 3. Menetapkan Musisi Hebat sebagai Pemusik di Taman Bekapai untuk berkarya
11	Bapak/Ibu Asuh Anak Stunting Kecamatan Balikpapan Kota (BASTING)	Non-digital	Program Basting merupakan program Kecamatan Balikpapan Kota untuk melakukan percepatan penurunan stunting dan menangani kasus stunting. Seluruh perangkat di Kecamatan Balikpapan Kota dan pemangku kepentingan diminta berperan aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting dan bersedia ditunjuk menjadi Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting, melalui kegiatan : 1. Memberikan penyuluhan dan motivasi tentang pola asuh anak kepada orang tua 2. Menjadikan bayi dan balita sebagai anak asuh, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan Balikpapan Kota 3. Memberikan bantuan berupa asupan telur kepada setiap anak sebanyak satu butir telur per hari dan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan. Manfaat yang diperoleh yaitu membantu menangani masalah stunting dengan pemberian bantuan makanan tinggi protein bagi anak stunting dan mendukung pencegahan stunting melalui edukasi orang tua dan monitoring perkembangan tumbuh kembang anak.

NO	NAMA INOVASI	JENIS	KETERANGAN
12	GEMPITA MOBILE	Teknologi	Manfaat Internal : 1. Terlaksananya pelayanan PTM sesuai standar untuk meningkatkan kinerja, pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan 2. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi skrining usia produktif dan usila 3. Mendapatkan basis data pemetaan kasus PTM yang akurat untuk bahan perencanaan kesehatan berbasis intervensi wilayah Manfaat Eksternal 1. Meningkatkan kesadaran hidup sehat 2. mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dan umpan balik/konsultasi via aplikasi 3. Meningkatkan pelayanan PTM secara efektif, efesien, adil dan merata 4. Meningkatkan fungsi pemberdayaan masyarakat melalui peran aktif kader 5. Memberikan informasi akurat pada stakeholder mengenai pemetaan kasus PTM sebagai masukan kebijakan atau perencanaan
13	Pemberdayaan Masyarakat dalam Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresure (BERKAT ASRI MANTAP)	Digital	Manfaat dari BERKAT ASRI MANTAP : 1. Kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh informasi melalui digitalisasi informasi pada laman link blog https://taplink.cc/gubah yang berisi seputar pelayanan kesehatan tradisional 2. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat menjadi meningkat tentang pelayanan kesehatan tradisional, dari tau menjadi mau dan akhirnya mampu melakukan 3. Membantu meningkatkan cakupan SPM, UKM esensial dan UKM pengembangan dalam Penilaian Kinerja Puskesmas
14	Sistem Pelayanan Khusus Komprehensif (SIMPANANKU KOPI)	Non-digital	Manfaat Internal untuk PTSP Kota Balikpapan : 1. Meningkatkan Cakupan Target Kinerja Layanan PTSP Kota Balikpapan: 2. Dengan menyediakan layanan yang lebih inklusif, PTSP dapat mencapai lebih banyak warga, termasuk penyandang disabilitas, sehingga meningkatkan cakupan target kerjanya. 3. Meningkatkan Rasa Empati dan Menambah Kemampuan Petugas Pelayanan: 4. Pelatihan dan pengetahuan tambahan tentang kebutuhan khusus penyandang disabilitas akan meningkatkan empati dan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif. 5. Menjadikan PTSP Kota Balikpapan sebagai Kantor Pelayanan yang Layak Disabilitas: 6. Dengan implementasi inovasi ini, PTSP akan menjadi contoh kantor pelayanan yang ramah disabilitas, sesuai dengan standar inklusivitas dan aksesibilitas. Manfaat Eksternal untuk PTSP Kota Balikpapan :

NO	NAMA INOVASI	JENIS	KETERANGAN
			1. Mempersingkat Proses Pelayanan untuk Penyandang Disabilitas: 2. Proses administrasi dan layanan publik menjadi lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu tunggu dan mempercepat pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. 3. Mempermudah Akses Pelayanan Publik Khusus Penyandang Disabilitas: 4. Aksesibilitas yang ditingkatkan melalui infrastruktur yang lebih baik dan teknologi khusus akan mempermudah penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik. 5. Mempermudah Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Informasi tentang Standar Pelayanan: 6. Informasi mengenai standar pelayanan akan lebih mudah diakses melalui berbagai saluran yang inklusif, seperti situs web yang ramah disabilitas dan materi informasi yang dapat diakses oleh semua. 7. Mempermudah Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Perizinan Usaha: 8. Penyandang disabilitas akan lebih mudah dalam mengurus perizinan usaha, berkat layanan yang lebih cepat dan informasi yang lebih jelas serta akses yang lebih mudah. 9. Transformasi Pelayanan Digital Menuju Mal Pelayanan Publik Digital: 10. Implementasi teknologi seperti aplikasi NVDA untuk tunanetra akan mendukung transformasi menuju pelayanan publik digital yang inklusif, memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengakses layanan secara mandiri dan efisien. 11. Dengan manfaat-manfaat tersebut, inovasi "SIMPANANKU KOPI" diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan inklusivitas pelayanan publik di PTSP Kota Balikpapan, sehingga mendukung visi smart city yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua warga.
15	Pelayanan Perizinan Sistem Jemput Bola Langsung (SIJEMPOL)	Non-digital	Pelayanan Sistem Jemput Bola Langsung (SIJEMPOL) memiliki beberapa manfaat, diantaranya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik khususnya perizinan, mempercepat proses perizinan dimana pemohon dapat langsung mengurus/konsultasi berkas-berkas kelengkapan dari instansi lain yang turut berkolaborasi di satu tempat, meningkatkan transparansi dan keakuratan informasi persyaratan, biaya dan alur seputar layanan publik karena langsung disampaikan petugas dinas/instansi terkait yang datang ke lokasi. Hal ini dapat mencegah terjadinya praktik calo serta pungutan liar dari yang resmi ditetapkan.

NO	NAMA INOVASI	JENIS	KETERANGAN
16	Sistem Pendaftaran Online Tanpa Antri (SPONTAN)	Digital	1. Kemudahan akses; 2. kenyamanan pengguna; 3. Keterlibatan Masyarakat; 4. Menghemat waktu; 5. Efisiensi&nbsp;dan 6. Menghemat biaya
17	LIHAT JAKETKU KEREN	Non-digital	Manfaat Internal: 1. Meningkatkan capaian kinerja pemicuan STBM pilar 4 yaitu pengelolaan sampah rumah tangga 2. Meningkatkan capaian kinerja program upaya kesehatan gigi dan mulut Masyarakat 3. Terlaksananya pelayanan Penyakit tidak menular (PTM) sesuai standar untuk meningkatkan kinerja, pencapaian standar pelayanan minimal Kesehatan Manfaat Eksternal: 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat 2. Meningkatkan fungsi pemberdayaan masyarakat melalui peran aktif masyarakat dalam memilah sampah 3. Menurunkan resiko penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan 4. Meningkatkan kemandirian masyarakat margasari dalam pembiayaan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bidang kesehatan. 5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan pelayanan Penyakit tidak Menular (PTM)
18	Pelayanan Mudah Agar Masyarakat Bahagia (PANAHA ASMARA)	Teknologi	Pihak Internal : 1. Tercapainya kinerja layanan pendaftaran penduduk dan pencatata sipil pada OPD Disdukcapil Kota Balikpapan; 2. Terdokumentasinya semua jenis layanan masyarakat pada OPD Disdukcapil Kota Balikpapan Pihak eksternal : 1. Masyarakat mendapatkan kemudahan akses pelayanan kependudukan; 2. Masyarakat memperoleh haknya untuk mendapatkan dokumen kependudukan
19	FROM IDEA TO START UP 'FITS BALIKPAPAN'	Digital	Manfaat yang diperoleh dari inovasi FITS Balikpapan adalah menyelaraskan amanah Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, yang difokuskan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sehingga dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, iklim usaha dan daya saing, serta memperluas kesempatan kerja.

NO	NAMA INOVASI	JENIS	KETERANGAN
20	KeCe BerAT	Teknologi	Manfaat Inovasi KeCe berAT; 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Pemanfaatan Toga dan Akupressur , serta pengendalian penyakit 2. Pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat 3. Integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan 4. Efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan 5. Dukungan terhadap program prioritas nasional (PIS PK dan Pengendalian penyakit 6. Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam lokal
21	Sinergi Pemberdayaan Masyarakat Kreatif Dalam Pengembangan Pariwisata Balikpapan (SI PERMATA)	Digital	Bagi Pemerintah Kota Balikpapan, sinergi pemberdayaan masyarakat kreatif dalam pengembangan pariwisata memungkinkan penguatan ekonomi kreatif dan pariwisata secara holistik dan terpadu, mempercepat pencapaian visi dan misi pembangunan kota untuk menjadikan Balikpapan sebagai kota terkemuka, nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman, serta mewujudkan kehadiran pemerintah yang nyata dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat legitimasi pemerintah; bagi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DPOP) Kota Balikpapan, sinergi lintas sektor memperluas jejaring kerja organisasi, membuka peluang kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat kreatif, dan meningkatkan capaian kerja Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang berdampak positif pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
22	Sistem Pelayanan Surat Pindah Sekolah Dasar, Ciptakan Efektivitas Kerja dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat (SIPOLDA CERDAS)	Digital	Bagi Internal Bidang PSD : 1. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang dilakukan Bidang PSD kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan berbasis online. 2. Meningkatnya kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. 3. Mendukung penyiapan database sistem pelayanan surat pindah sekolah. 4. Mendukung digitalisasi dokumen dalam melakukan pelayanan surat pindah sekolah karena terintegrasi dengan seluruh SD. 5. Memudahkan dalam pencarian dokumen arsip surat pindah sekolah dasar. 6. Sebagai alat kontrol dalam melakukan monitoring efektivitas kerja dan peningkatan kepuasan masyarakat. Bagi Eksternal Bidang PSD 1. Memberikan praktik baik bagi bidang lain dalam satu organisasi agar termotivasi dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

NO	NAMA INOVASI	JENIS	KETERANGAN
			2. Memberi kemudahan orang tua siswa untuk mengurus kepindahan putra-putrinya tanpa harus mengeluarkan banyak waktu, tenaga dan biaya. 3. Sebagai alat monitoring dan evaluasi pelayanan publik yang telah dilakukan.
23	Bank sampah Emas	Non-digital	Manfaat Bank Sampah yaitu Bagi Masyarakat dan lingkungan Sekitarnya yaitu : 1. Masyarakat jadi lebih peduli dalam pengelolaan sampah 2. Sistem penukaran sampah memungkinkan hadirnya perekonomian baru bagi masyarakat. 3. Terbukanya lapangan kerja baru dari pengelolaan sampah. 4. Lingkungan tempat tinggal masyarakat menjadi lebih Asri dan terjaga dari sampah.
24	Sistem Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terintegrasi (Si POTER)	Non-digital	Sistem Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terintegrasi (Si POTER) sangat bermanfaat untuk menjaga Kota Balikpapan yang kondusif dan nyaman dihuni. Ketika ada laporan terkait adanya ODGJ yang mengamuk atau meresahkan masyarakat di fasilitas umum, maka dapat segera ditindaklanjuti oleh Tim Satgas Peduli Orang Dengan Gangguan Jiwa. Selain itu, dapat membantu keluarga dalam proses pengiriman atau merujuk ke Rumah Sakit Jiwa mengingat biaya pengiriman ke Rumah Sakit Jiwa dapat terbilang cukup mahal. Secara birokrasi, inovasi Sistem Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terintegrasi (Si POTER) juga berdampak pada kemudahan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk penanganan ODGJ di Kota Balikpapan karena adanya pembagian tugas sesuai dengan standar operasional prosedur.
25	Meningkatkan Kemampuan Menghitung Konsep Dasar Pembagian Melalui Media Mistar Pembagian	Non-digital	Kebermanfaatan dari inovasi Mistar Pembagian ini sudah dapat dirasakan oleh berbagai pihak baik peserta didik, guru, sekolah, bahkan masyarakat terutama orang tua. Pembuatan dan penggunaan yang mudah dan menyenangkan sehingga semua pihak bisa langsung memanfaatkannya. Bagi peserta didik ini merupakan media yang menyenangkan karena didesain menyerupai permainan, selain itu juga bisa digunakan tidak hanya secara manual tetapi juga secara digital. Bagi guru dan orang tua kebermanfaatan yang sudah dirasakan adalah media ini mampu menjadi solusi dari permasalahan pembelajaran di sekolah dan di rumah sekaligus mampu menciptakan pembelajaran yang interaktif. Dari sekian manfaat tentu saja akan berimbas pada peningkatan mutu pendidikan sekolah, dimana telah mampu meningkatkan nilai numerasi dalam raport pendidikan. Dari segi bahan baku pembuatan Media Mistar Pembagian ini menjadikan media yang murah meriah, karena hanya terbuat dari kertas yang diprint, sementara media digitalnya juga

NO	NAMA INOVASI	JENIS	KETERANGAN
			memanfaatkan aplikasi google sheet yang gratis sudah disediakan oleh google.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Balikpapan Tahun 2024 ini disusun sebagai suatu kewajiban konstitusional dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan merupakan wujud dari pertanggungjawaban yang transparan kepada masyarakat, dengan harapan semoga di tahun-tahun mendatang segala upaya dan perjuangan kita dalam memajukan Kota Balikpapan senantiasa diridhoi Allah SWT. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Balikpapan , 17 Maret 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,



H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.